

ABSTRACT

“The Legality of Hunting Endangered Animals in Terms of Tradition Interests in Indonesia (Case Study: The Hunting of Sperm Whales in Lamalera, East Nusa Tenggara”

By:

Dissa Azalia¹ and Sri Wiyanti Eddyono²

This legal research aims first, to explore, discover and analyze the legality of traditional hunting of endangered animals in Indonesia with a case study of sperm whales hunting in Lamalera, East Nusa Tenggara. The second objectives are to explore, discover, and analyze about the actions that have been taken by the Indonesian government regarding hunting endangered animals and sperm whales hunting in Lamalera, East Nusa Tenggara.

This research is a normative-empirical legal research. The type of data that used are primary data obtained from resource persons by interviews and secondary data obtained from literature studies.

Based on the results of research that conducted, it can be concluded first, that the sperm whales hunting in Lamalera, East Nusa Tenggara refers to Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 13 of 1994 concerning Hunting for Animals which says that animals that are allowed to be hunted are animals that are not included in the protected category. Meanwhile, in Appendix number 106 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of Indonesia Number P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 concerning the Types of Protected Plants and Animals, sperm whales are protected animals. Secondly, there is still a lack of actions taken by the Government to hunt protected animals as well as traditional sperm whales activities in Lamalera, East Nusa Tenggara.

¹ Student of Faculty of Law International Undergraduate Program, Gadjah Mada University.

² Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

INTISARI

“Legalitas Perburuan Hewan Dilindungi untuk Kepentingan Tradisi di Indonesia (Studi Kasus: Perburuan Tradisional Paus Sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur)”

Oleh:

Dissa Azalia³ dan Sri Wiyanti Eddyono⁴

Penelitian hukum ini bertujuan pertama, untuk menelusuri, mengetahui, dan menganalisis tentang legalitas perburuan tradisional hewan dilindungi di Indonesia dengan studi kasus perburuan paus sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Tujuan kedua adalah untuk menelusuri, mengetahui, dan menganalisis tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai perburuan hewan dilindungi maupun perburuan paus sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pertama, bahwa perburuan paus sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru yang mengatakan bahwa satwa yang diperbolehkan untuk diburu adalah satwa yang tidak termasuk kategori dilindungi. Sedangkan, di dalam Lampiran nomor 106 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia No. P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Hewan Dilindungi, paus sperma termasuk hewan yang dilindungi. Kedua, masih kurangnya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk perburuan hewan dilindungi serta kegiatan perburuan tradisional paus sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur.

³ Mahasiswa Strata-I (S1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada